

Strategi Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Gowa

Kasmira^{1*}, Alyas², Sudarmi³

- 1) Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
- 2) Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
- 3) Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This is study purposed to find out the government's strategy in the construction of road infrastructure in Gowa Regency. This study used qualitative descriptive study, while data collection techniques used observation, interviews and documentation. This study consisted of 5 informants were head of Highways, Section for Road Development/Improvement, Road and Bridge Maintenance Section, and 2 people/road users. Data Sources used primary and secondary data, data analysis techniques with data reduction, data presentation and verification. The data validation used source triangulation, technique triangulation, and time triangulation. The result of this study showed ththat the government Strategy in the development of Road Infrastructure in Gowa Regency had been run well because in terms of human resources, effectiveness, objectives were maximally appropriate without waste (not wasting time, energy, cost) able to carry out tasks correctly and accurately. Although it had not run optimally due to constraint that often accured, namely the delayed budget/cost, so the implementation of road construction or maintenance was still less efficient.

Keywords: *development strategy, road infrastructure*

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sementara informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang adalah Kepala Bidang Bina Marga, Seksi Pembangunan/peningkatan Jalan, Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dan 2 orang Masyarakat/pengguna jalan. Sumber Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Pengabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Gowa sudah berjalan dengan baik karena dari sisi sumber daya manusia, efektifitas, tujuan sudah maksimal sesuai tanpa pemborosan (tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya) mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat. Meskipun belum berjalan dengan optimal karena kendala yang sering terjadi yaitu pada anggaran/biaya yang tertunda sehingga pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jalan masih kurang efisien.

Kata Kunci: strategi pembangunan, infrastruktur jalan

* kasmira@gmail.com

PENDAHULUAN

Pembangunan jalan merupakan salah satu hal yang sangat penting sebagai pendukung utama dinamika dan aktivitas ekonomi baik di pusat maupun di daerah. Jalan juga memiliki manfaat strategis yaitu salah satunya menciptakan lapangan pekerjaan yang berskala besar. Di Indonesia, penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan jalan terbagi atas tiga kewenangan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerintah pusat berwenang dalam penyelenggaraan jalan nasional dan jalan tol, pemerintah daerah provinsi/kota berwenang dalam penyelenggaraan jalan provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang dalam penyelenggaraan jalan kabupaten/kota. Penyelenggaraan jalan diartikan sebagai kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.

Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan; pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia

serta penelitian dan pengembangan jalan; pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan, sedangkan pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pengembangan jalan.

Departemen Pekerjaan Umum (PU) memberikan gambaran tentang proses perencanaan, konstruksi dan pemeliharaan jalan. Perencanaan jalan didasarkan kepada Muatan Sumbu Terberat (MST) untuk jalan nasional adalah sebesar 8-10 ton, artinya seluruh jalan adalah sebesar 8-10 ton, artinya untuk seluruh jalan yang ada beban maksimal suatu sumbu tunggal kendaraan adalah 8-10 ton, jika melebihi maka umur rencana jalan akan berkurang secara drastis. Pada kegiatan konstruksi pembangunan jalan, setiap unit pelaksanaan konstruksi selalu diawasi secara seksama oleh pemerintah sebagai pemilik proyek dan konsultan pengawas, sehingga sangat mustahil adanya penyimpangan mutu.

Pada kegiatan pemeliharaan jalan, pada dasarnya pemeliharaan rutin (rutine) dan berkala (periodic) dilakukan secara terjadwal setiap periode tertentu dan perbaikan jalan

(betterment) dilakukan hanya pada kondisi kerusakan struktural jalan. Kerusakan jalan yang ada tidak mungkin terjadi pada mutu konstruksi, namun kemungkinan terjadi pada proses pemeliharaan yang disebabkan karena keterbatasan anggaran pemeliharaan jalan, namun itupun bukan merupakan kerusakan struktural seperti sering terlihat dipangan saat ini. Faktor yang mempengaruhi kerusakan jalan yang ada saat ini adalah diakibatkan karena beban berlebih (overloading) dari kendaraan berat. Sekali saja terjadi kerusakan struktural dari suatu jalan maka akan berdampak secara efek kepada struktur jalan disekitarnya.

Ketika suatu jalan menahan beban lebih besar dari muatan standarnya maka tingkat kerusakan jalan meningkat lebih cepat dari dari umur rencananya. Dilihat dari beberapa aspek sosial budaya, keberadaan jalan membuka cakrawala masyarakat yang dapat menjadi wahana perubahan sosial, membangun toleransi dan mencairkan sekat budaya. Dari aspek lingkungan, keberadaan jalan diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dari aspek politik, keberadaan jalan menghubungkan dan mengikat antardaerah, sedangkan dari aspek pertahanan dan keamanan, keberadaan jalan memberikan akses dan

mobilitas dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 Bab III ayat 1 dan 3 yang berbunyi: Ayat 1 mengatakan bahwa "Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat", Ayat 3 mengatakan bahwa "Jalan yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia".

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai infrastruktur jalan di Kabupaten Gowa, faktor yang berpengaruh terhadap tidak tercapainya umur rencana jalan, diantaranya adalah keadaan lingkungan, sumber daya manusia, pelaksanaan pekerjaan, kondisi tanah, material dan keuangan. Oleh karena itu, pihak-pihak terkait seperti owner, kontraktor dan konsultan pengawas harus dapat mengidentifikasi dan mengetahui penanganan faktor-faktor yang berdampak pada tidak tercapainya umur rencana jalan. Hasil identifikasi tersebut juga dapat digunakan agar kualitas konstruksi jalan dapat bertahan selama umur/masa pelayanan serta pembangunan dapat

berkelanjutan sesuai dengan program pembangunan nasional.

Pada umumnya istilah strategi digunakan untuk memenangkan suatu peperangan dalam permasalahan dunia militer yang sebagai cara digunakan untuk memanfaatkan kekuatan militer. Sedangkan terminologi strategi banyak ahli yang telah mengemukakan sudut pandang yang berbeda-beda tentang strategi, namun pada dasar hakikatnya itu mempunyai arti atau makna yang sama yakni pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Menurut pendapat Argyris, dkk (Hutapea,2017) Strategi merupakan respon secara terus menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang membuat dampak dalam perkembangan dalam sebuah organisasi. Berbeda dengan pendapat Siagian (2006) yang menyatakan bahwa strategi adalah suatu rangkaian dari keputusan atau tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh para jajaran agar sesuatu organisasi dapat mencapai tujuan dari organisasi tersebut.

Wheelen dan Hunger (2012) memberikan pendapat yang sama mengenai strategi yang dimana menurutnya strategi merupakan tempat sekumpulan dari keputusan manajerial

dan merupakan aksi pengambilan keputusan jangka panjang disuatu perusahaan. Hal tersebut meliputi analisis lingkungan eksternal dan internal, formulasi strategi, implementasi strategi, evaluasi dan kontrol. Sedangkan Suryono (2004) mengungkapkan bahwa pengertian strategi pada prinsipnya selalu berkaitan dengan tiga hal utama yaitu, tujuan, sasaran, dan cara. Oleh karena itu, ketiga prinsip tersebut harus dimiliki dalam penerapan strategi yang ingin dijalankan. Lain halnya dengan Bintoro (1982) yang berpendapat bahwa strategi merupakan keseluruhan langkah-langkah (kebijaksanaan) dengan perhitungan yang pasti, guna mencapai tujuan untuk mengatasi permasalahan, dimana didalam strategi itu terdapat metode dan teknik.

Setiap organisasi pasti memiliki strategi untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Tipe strategi yang digunakan dalam suatu organisasi tidaklah sama. Ada beberapa strategi yang digunakan dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Jack Kooten (1991:81), tipe - tipe strategi meliputi: a) Corporate Strategy (Strategi Organisasi) Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai - nilai, dan inisiatif -

inisiatif strategi yang baru. Pembatasan - pembatasan diperlukan yaitu mengenai apa yang dilakukan dan untuk siapa, b) Program Strategy (Strategi Program) Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi - implikasi strategi dari program tertentu. Kira - kira apa dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan (apa dampaknya bagi sasaran organisasi), c) Resource Support Strategy (Strategi Pendukung Sumber Daya) Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi, dan sebagainya, d) Institusional Strategy (Strategi Kelembagaan) Fokus dari strategi institusional ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif - inisiatif strategi.

Strategi yang dijalankan pada sektor pemerintahan dapat dilihat upaya dari pemerintah dalam membuat strategi agar dapat tercapainya tujuan dimasa depan dengan menganalisis situasi dan kondisi dimasa sekarang dan masa depan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah membuat perbedaan pengelolaan dengan sektor privat.

Perbedaan ini terutama disebabkan adanya perbedaan karakteristik.

Pemerintah adalah sekelompok orang yang mempunyai peran penting dalam negara yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan tugasnya yang dalam arti melaksanakan tanggung jawab dan wewenang yang sah dalam melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan. Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik ditingkat lokal. Pemerintah (government) ditinjau dari pengertiannya adalah the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect, dalam bahasa indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah negara, kota dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai the governing body of a nation, state, city, etc yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah

dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja (Riawan:2009).

Pemerintah tidaklah dibuat untuk memanfaatkan kekuasaannya untuk melayani dirinya sendiri, tetapi keberadaannya untuk melayani masyarakat. Sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Pasal 1 (angka 2) bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan. Philipus (2005) memberikan pendapat lain mengenai pemerintah, yaitu pemerintah dapat dipahami melalui dua pengertian, disatu pihak dalam arti "fungsi pemerintah" (kegiatan pemerintah), dilain pihak dalam arti "organisasi pemerintah" (kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintah). Fungsi pemerintah ini secara keseluruhan terdiri dari berbagai macam tindakan-tindakan pemerintah, keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang bersifat umum, tindakan-tindakan hukum perdata dan tindakan-tindakan nyata.

Hanya perundang-undangan dari penguasa politik dan pradilan oleh para hakim tidak termasuk didalamnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasannya di Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Secara umum pemerintahan yang diselenggarakan mempunyai dua fungsi utama, yaitu: fungsi pengaturan (regulation) dan fungsi pelayanan (services), dalam kaitannya dengan dua fungsi tersebut, suatu negara bagaimanapun bentuknya dan seberapa pun luasnya wilayah, tidak akan mampu menyelenggarakan pemerintahan secara sentral (terpusat) secara terus menerus. Keterbatasan kemampuan pemerintah menimbulkan konsekuensi logis bagi distribusi urusan-urusan pemerintahan negara kepada pemerintah daerah (Sarundajang, 2000:16).

Salah satu konsep pembangunan yang sangat populer di Indonesia adalah sebagaimana yang tercantum dalam GBHN 1993, yang mengemukakan

bahwa pembangunan pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Konsep pembangunan ini mengandung arti bahwa pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah atau fisik seperti kecukupan pangan, sandang, perumahan, dan kesehatan, tetapi juga aspek batiniah atau non fisik, seperti pendidikan, rasa aman, kebebasan mengeluarkan pendapat secara bertanggung jawab, dan rasa keadilan. Dengan demikian, konsep pembangunan sesuai GBHN adalah rangkaian upaya perubahan dalam semua aspek kehidupan bangsa seperti aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Phillips Roupp yang dikutip Khairuddin (1992), mengemukakan bahwa *development signifies change from something thought to be less desirable to something thought to be more desirable* (pembangunan adalah perubahan dari sesuatu yang kurang berarti kepada yang lebih berarti). Adapun pendapat Mizra (Khairuddin, 1992) mengemukakan bahwa *Development is basically a human enterprise and therefore it requires the combined efforts of all systems of knowledge, be they physical, biological,*

social or human to comprehend and articulate it (Pembangunan pada dasarnya adalah usaha manusia dan untuk memahami pembangunan tersebut dibutuhkan usaha-usaha yang terpadu dari seluruh sistem pengetahuan, baik fisik, biologi, sosial maupun tentang manusia).

Infrastuktur jalan adalah kebutuhan mutlak dalam sistem angkutan jalan raya. Kinerja sistem transportasi jalan raya akan bergantung pada seberapa besar daya dukung prasarana jalan yang mampu disediakan untuk mencapai sasaran-sasaran pokok dalam suatu sistem transportasi. Dilihat dari kewenangannya, infrastruktur jalan dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu: a) Jalan Nasional, yaitu merupakan jalan arteri atau jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer. Jalan ini menghubungkan antar ibukota provinsi, jalan strategis nasional, serta jalan tol. Tanggung jawab pembinaan jalan nasional berada pada pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum). Jalan nasional ini melayani kepentingan nasional atas dasar strategis, yaitu mempunyai peranan untuk membina kesatuan dan keutuhan nasional, melayani daerah-daerah rawan, bagian dari jalan lintas regional atau lintas internasional, melayani kepentingan

perbatasan antar negara, serta dalam rangka pertahanan dan keamanan, b) Jalan Provinsi, yaitu merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi, c) Jalan Kabupaten/Kota, yaitu merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten/kota dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten/kota dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten/kota, dan jalan strategis kabupaten/kota.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan yaitu pada bulan september sampai dengan november 2019 dan penulis memilih lokasi penelitian di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terletak di Jalan Tamanurung Raya, Sungguminasa, Kabupaten Gowa. Sumber data yang digunakan ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Penulis melakukan wawancara dengan informan menggunakan pedoman

wawancara. Dengan jumlah informan, 5 informan, 1 Kepala Bidang Bina Marga, 1 Seksi Pembangunan/Peningkatan Jalan, 1 Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dan 2 orang masyarakat.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Untuk menyajikan data dari berbagai jawaban informan, penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan serta teknik keabsahan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gowa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa yang merupakan gabungan dari tiga SKPD yaitu SKPD Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Gowa, SKPD Kantor Kebersihan Kabupaten Gowa dan SKPD Dinas Cipta Karya Kabupaten Gowa. Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas mempunyai tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Gowa Nomor 32 Tahun 2008 Tanggal 22 Desember 2008 adalah melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, mempunyai fungsi sebagai berikut : a) Perumusan kebijakan teknis di bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang meliputi urusan Bina Marga, Cipta Karya, Teknik dan Perencanaan, Tata Ruang, Operasional dan Pemeliharaan Pengairan dan Pengairan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang meliputi Bina Marga, Cipta Karya, Teknik dan Perencanaan, Tata Ruang, Operasional dan Pemeliharaan Pengairan dan Pengairan. c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya; d) Pengelolaan administrasi umum meliputi ke Tatalaksanaan, Keuangan, Kepegawaian, Perlengkapan dan Peralatan. e) Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan dan fungsinya.

Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa

dijabarkan sebagai berikut: “Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum, Permukiman dan Penataan Ruang yang berkualitas”. Visi yang dirumuskan ini juga menjadi acuan dan penuntun bagi setiap upaya yang akan dikembangkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tersebut antara lain: a) Pelayanan Profesional, artinya adalah Pelayanan Umum yang diberikan oleh Instansi Pemerintah dengan memperhatikan penempatan personil yang tepat dalam bidang tugas keahliannya. b) Transparan, merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasluasnya tentang sistem pelayanan pemerintah. c) Akuntabel, mempunyai arti yang sangat dalam, namun secara singkat dapat diartikan “dapat dipercaya” dan “bertanggung jawab”.

Untuk tercapainya visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa tahun 2016-2021, dan memperhatikan identifikasi masalah pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa serta isu strategis yang sudah dijabarkan, dapat dirumuskan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2016-2021 sebagai berikut: a) Meningkatkan aksesibilitas

dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan dan jembatan yang andal dan terpadu; b) Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan; c) Mewujudkan Penataan Ruang sebagai acuan matra spasial pembangunan daerah serta keterpaduan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman berbasis Penataan Ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan; d) Meningkatkan kualitas perencanaan teknis infrastruktur yang berkualitas dan inklusif; e) Mewujudkan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana irigasi secara optimal dan berkelanjutan yang mendukung ketahanan air dan kedaulatan pangan; f) Mewujudkan upaya penyelenggaraan konservasi sumber daya air dan pengendalian daya rusak air serta operasi pemeliharaan jaringan pengairan yang berwawasan lingkungan untuk menjaga kelestarian air dan sumber air; g) Meningkatkan peran serta masyarakat petani pemakai air dan kerjasama para pihak pengelola sumber daya air secara terpadu; h)

Meningkatkan perencanaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pendayagunaan sumber daya air ketersediaan yang ditunjang dengan ketersediaan data dan sistem informasi yang terbaru; i) Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumberdaya yang akuntabel, kompeten dan inovatif menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Strategi merupakan suatu perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan, namun untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang memberikan arah saja melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Terkadang strategi memiliki tujuan utama dan tujuan dari kepentingan-kepetingan yang berperan aktif dalam pembentukan strategi tersebut. Strategi sangat dibutuhkan didalam suatu pembangunan ataupun didalam suatu program, demikian halnya di Kabupaten Gowa mengenai pembangunan infrastruktur jalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, yaitu prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap danperlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas,

yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.

Pemerintah Kabupaten Gowa menetapkan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan yang bertujuan untuk membiayai Infrastruktur pembangunan jalan dan irigasi di Kabupaten Gowa. Dalam penelitian ini akan diuraikan Strategi Pemerintah dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan. Terdapat 3 item penting untuk mengukur dan mengetahuinya, yaitu meliputi: (1) Sumber Daya manusia; (2) Efisien; (3) Efektif; (4) Tujuan. Hasil pengkajian keempat hal tersebut adalah sebagai berikut:

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi sejumlah individu-individu atau orang-orang yang berperang penting didalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Segala potensi sumber daya yang dimiliki manusia dapat dimanfaatkan sebagai

usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan baik secara pribadi maupun secara organisasi. Sumber Daya yang dimaksudkan adalah waktu, tenaga dan kemampuan manusia (baik daya pikir maupun fisiknya) yang benar-benar dapat dimanfaatkan secara terpadu dan secara optimal bagi kepentingan organisasi.

Sumber daya manusia ada dua yaitu jumlahnya cukup dan kualitas. Jumlah yang dimaksudkan adalah orang-orang yang berperan didalam suatu organisasi yang harus memiliki kemampuan, kerja keras, serta dapat mencapai tujuan organisasi. Jadi, orang-orang yang bekerja dan dapat berfungsi sebagai aset di dalam organisasi tersebut atau perusahaan yang dapat dihitung jumlahnya. Sumber Daya Manusia yang dijelaskan diatas sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Sumber daya manusia diharapkan terus membantu usaha dalam mengembangkan berbagai potensi pribadi agar akhirnya hasil terbaik yang diharapkan dapat terwujud semua tentunya perlu keahlian dan kemampuan.

Sumber daya manusia adalah orang-orang yang memiliki peran penting atau yang bekerja dalam suatu organisasi. Maka sumber daya manusia

yang bekerja atau yang bertugas dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan yaitu kontraktor/pemborong dan juga kulih bangunan atau yang biasa disebut tukang. Pelaksanaan pekerjaan jalan di lapangan itu melalui pihak ketiga (rekanan) yang pemilihannya melalui proses tender sesuai PerPres yang berlaku, yaitu PerPres 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah, sebelumnya PerPres No.54 tahun 2010 yang proses pelaksanaannya dilaksanakan oleh unit layanan pengadaan Kabupaten Gowa. Setelah proses pemilihan rekanan (kontraktor pelaksana) selesai (telah ditetapkan pemenang lelang atas pekerjaan yang dilelang), maka dilaksanakan kontrak kerja antara PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang ditunjuk mewakili Pemerintah Kabupaten Gowa dengan pemenang lelang untuk selanjutnya melaksanakan pekerjaan di lapangan sampai selesai dengan isi kontrak yang telah ditangani.

Efisien

Efisien adalah suatu pekerjaan yang dilakukan secara cepat dan tepat yang mendapatkan suatu hasil yang diinginkan dengan tepat waktu tanpa membuang-buang waktu, biaya dan tenaga. Efisien itu adalah dapat mengerjakan pekerjaan dengan benar

dan tepat, maksudnya adalah mampu menyelesaikan suatu pekerjaan dengan target waktu yang sesuai dengan yang telah ditentukan serta pekerjaan yang dilakukannya itu benar dan dapat memberikan hasil sesuai dengan yang diinginkan.

Efisien adalah aktivitas untuk meminimalisir kerugian atau pemborosan sumber daya dalam menghasilkan atau melaksanakan sesuatu, atau sejauh mana waktu, tenaga, atau biaya yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan. Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien jika ada perbaikan pada prosesnya, seperti menjadi lebih cepat atau lebih murah. Dalam hal ini, semakin sedikit sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diharapkan maka prosesnya dapat dikatakan semakin efisien. Efisien sering dilakukan pada berbagai bidang kehidupan manusia yang tentunya memiliki tujuan sebagai alasan dilakukannya. Efisien yang dimaksudkan di atas sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Menurut Arthur A.J. (2007:) mengatakan strategi terdiri dari aktivitas-aktivitas yang penuh daya saing serta pendekatan-pendekatan bisnis untuk mencapai kinerja yang memuaskan (sesuai target).

Efektif

Efektif adalah sebuah usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil ataupun target yang diharapkan/dihendaki dengan waktu yang telah ditentukan terlebih dahulu tanpa memperdulikan biaya yang harus dikeluarkan. Maksudnya adalah melakukan sesuatu yang dapat memberikan hasil. Keefektifan seseorang dilihat dari bagaimana ia tidak mudah menyerah dari apa yang ingin ia lakukan. Tidak ada salahnya jika seseorang melakukan usaha secara efektif karena hal tersebut sangat bagus dan baik untuk diterapkan.

Sikap yang efektif lebih ditekankan pada suatu usaha dalam mewujudkan strategi usaha, target pekerjaan, dan taktik bisnis dalam mengolah usaha. Adanya pertimbangan dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang hendak dilakukan agar kegiatan tersebut tidak hanya berjalan saja namun berjalan dan memberikan hasil serta tujuan yang hendak dicapai dengan waktu yang sesuai target. Efektif adalah sebuah usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil ataupun target yang diharapkan/dihendaki dengan waktu yang telah ditentukan terlebih dahulu tanpa memperdulikan biaya yang harus dikeluarkan. Selain itu efektif juga dapat diartikan sebagai

suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah di rencanakan sebelumnya.

Suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif. Efektif yang dimaksudkan diatas sejalan dengan teori yang di kemukakan oleh Salusu (2006:101) yaitu suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan disebut dengan strategi.

Tujuan

Tujuan adalah keinginan yang hendak dicapai diwaktu yang akan datang yang digambarkan secara umum dan relatif tidak mengenal batas waktu. Maksudnya adalah kunci yang menentukan bahwa suatu kegiatan yang dilakukan apakah memiliki tujuan atau tidak dilihat berdasarkan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. Tujuan adalah keinginan yang hendak dicapai diwaktu yang akan datang yang digambarkan secara umum dan relatif

tidak mengenal batas waktu. Tujuan yang dimaksudkan diatas sejalan dengan teori yang di kemukakan oleh Kuncoro (2005:12) yang mengatakan “Strategi adalah sejumlah keputusan dan aksi yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan (goal) dan menyesuaikan sumber daya organisasi dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan industrinya.

Anggaran

Anggaran adalah sebagai suatu perencanaan dalam perusahaan atau organisasi yang disusun secara terpadu dan dijelaskan dalam satuan unit moneter pada periode atau jangka waktu yang sudah ditentukan. menurut Ibnu Syamsi S.U (1994:90), menyatakan “Anggaran adalah hasil dari perencanaan yang berupadaftar mengenai bermacam-macam kegiatan terpadu, baik yang menyangkut penerimaannya maupun pengeluarannya yang dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu”. Sedangkan menurut Baldrick Siregar dan Boni siregar (1999:38), mengemukakan bahwa “Anggaran adalah jumlah rupiah yang direncanakan untuk aktivitas yang dilakukan pada periode waktu tertentu”. Dalam melakukan suatu kegiatan pembangunan jalan diperlukan adanya

perencanaan anggaran, guna untuk mengetahui seberapa besar anggaran yang dikeluarkan dalam pembangunan jalan tersebut atau dengan kata lain Rencana Anggaran Biaya (RAB). Untuk itu, dalam penyusunan anggaran dibutuhkan suatu prinsip dan norma agar dalam penyusunannya dapat terlaksana dengan baik.

Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan prinsip dan norma anggaran menurut (World Bank:1998) yaitu : Transparan dan Akuntabel, hal ini sesuai dengan kerangka otonomi daerah dengan mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan bertanggung jawab, dimana diperlukan syarat transparansi dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah. Tentang Disiplin Anggaran. Anggaran yang disusun harus berdasarkan kebutuhan masyarakat dan tidak boleh mengesampingkan keseimbangan antar pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Efisiensi dan Efektivitas Anggaran, artinya alokasi dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, disusun berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang berkualitas bagi masyarakat. Keadilan

Anggaran, yaitu penggunaan anggaran secara adil untuk kepentingan seluruh kelompok masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah adil secara gender. Berikutnya akan dijelaskan kegunaan anggaran secara umum menurut Kusnadi (1999:40,41) : Memberi arah atas kegiatan/aktivitas yang akan dikerjakan sehingga kegiatan yang dilakukan akan menjadi terarah terhadap tujuan yang telah dikehendaki. Anggaran akan dapat membatasi kegiatan/aktivitas hanya padagang penting dan perlu. Anggaran dapat dijadikan alat pengawasan organisasi. Dengan adanya anggaran, maka setiap penyimpangan yang ada akan mudah diukur sehingga berbagai tindakan perbaikan dapat diambil. Penggunaan metode, alat dan tenaga kerja akan semakin efektif dan efisien sehingga kinerja organisasi akan semakin baik dan terarah sesuai dengan prinsip efektivitas dan efisiensi.

KESIMPULAN

Sumber daya manusia yang bekerja atau yang bertugas dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan yaitu kontraktor/pemborong dan juga kulih bangunan atau yang biasa disebut tukang. Pelaksanaan pekerjaan jalan di lapangan itu melalui pihak ketiga (rekanan) yang pemilihannya melalui

preses tender sesuai PerPres yang berlaku, yaitu PerPres 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah, sebelumnya PerPres No.54 tahun 2010 yang proses pelaksanaannya dilaksanakan oleh unit layanan pengadaan Kabupaten Gowa. Setelah proses pemilihan rekanan (kontraktor pelaksana) selesai (telah ditetapkan pemenang lelang atas pekerjaan yang dilelang), maka dilaksanakan kontrak kerja antara PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang ditunjuk mewakili Pemerintah Kabupaten Gowa dengan pemenang lelang untuk selanjutnya melaksanakan pekerjaan di lapangan sampai selesai dengan isi kontrak yang telah ditangani.

Dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan, ada beberapa wilayah yang masih kurang efisien karena begitu banyak kendala-kendala yang terjadi terutama pada anggaran juga pada kontraktor ataupun pemborongnya. Pelaksanaan atau pengerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan kadang tidak selesai tepat waktu karena anggaran yang tidak semua terbayarkan dalam tahun target penyelesaian pembangunan dan pemeliharaan jalan. Suatu kegiatan yang dirancang pastinya memiliki tujuan yang ingin dicapai, hanya saja bagaimana proses dan cara agar tujuan

tersebut dapat terwujudkan terutama dalam pembangunan jalan yang seringkali mengalami kerusakan karena beban berlebih atau overloading.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrodin. 2010. Konsep Dasar Manajemen Strategik 2.1 Eprints.walisongo.ac.id/3013/3/1104034_Bab2.pdf. Grant, Robert. M. 1999. Analisis Strategi Kontemporer: Konsep, Teknik, Aplikasi. Edisi kedua, Terjemahan Thomas Secokusumo. Jakarta: Erlangga
- David, Freed R. 2017. Manajemen Strategik Suatu Pendekatan Keunggulan Bersaing. Jakarta: Salzmba Empat
- Hariadi, Bambang. 2005. Strategi Manajemen. Malang: Bayumedia Publishing.
- Hatten, Kenneth J, dan Hatten, Marry Louise. 1998. Efektive Strategi Management. Englewood cliffs: Precentice Hall.
- Heene, Aime dan Desmith, Sebastian. 2010. Manajemen Strategik Keorganisasian Publik. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hidayat, Rizal A. 2008. Manajemen Strategik. Model Balance Score Card: Kajian Tahap Formulasi Strategi, Jurnal Forum Ilmiah Indonesia. Volume 5 No.1
- Hutapea. 2017. Strategi Pemerintah Dalam Pembangunan Kawasan Wisata Muara Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015. Jurnal Organisasi Manajemen. Volume 4 No.1
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif. Jakarta: Erlangga.
- Riswan. 2009. Hukum Pemerintah Daerah. Bandung: Citra adiyati Bakti
- Salusu. 2006. Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Nonprofit. Jakarta: Grasindo.
- Suryono. 2004. Pengantar Teori Pembangunan. Malang: Universitas Negeri Malang, UM. Press.
- Tjokroadmidjojo, Bintoro. 1982. Teori Strategi Pembangunan Nasional. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Wheelen, T dan Hunger, D. 2012. Strategic Management and Business Policy.13th. Prentice Hall.